

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Algra dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 23
- Cristhoper More dalam Maria S.W, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 112-113
- Doli D. Siregar, *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 414
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 63
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa), hlm. 60
- Suteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 133
- Titik Triwulan & Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011), hlm. 9
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Kencana: Jakarta, 2005)

## JURNAL

- Agung Dinarjito, “*Penyertaan Modal Negara Pertumbuhan Aset dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara*”, E-Journal Akuntansi, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, hlm. 1324
- Andrew Grey, “*Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 72/G/2018/PTUN.BDG)*”, Indonesian Notary, Vol. 2, No. 2, Juni 2020, hlm. 795
- Arivan Amir, “*Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali*”, Repertorium, Vol. 8, No. 1, Mei 2019, hlm. 54
- Dikdik Somantri, “*Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara*”, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 4, No. 2, 2 Agustus 2021, hlm. 124
- I Gede Aris Eka Pramana, I Made Arjaya & Ida Ayu Putu Widiati, “*Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/Ptun.Dps)*”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 78
- Indah Sari, “*Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 9, No.1, hlm. 21
- Isis Ikhwansyah, An-an Chandrawulan, & Prita Amalia, “*Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*”, Media Hukum, Vol. 25, No. 2, Desember 2018, hlm. 152
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57
- Josepus J. Pinori, “*Keberadaan Privatisasi BUMN di Indonesia*”, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 7, Agustus 2015, hlm. 172
- Maharani Nurdin, “*Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Positum, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 129

- Mohammad Safir Ramadhan Usup, Godleib N. Mamahit, & Berlian Manoppo, *“Pengaturan Hukum Tentang Tanah yang Dapat Diberikan Hak Pakai Ditinjau Dari PP NO. 10 Tahun 1996 HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah”*, *Lex Crimen*, Vol. VII. No. 6, Agustus 2018, hlm. 60
- Rahmi Situmorang & Amiruddin Ketaren, *“Konflik Perebutan Lahan Perkebunan PTPN IV dengan Masyarakat Desa Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun”*, *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Juli 2021, hlm. 120
- Ridwan HR di dalam *Jurnal Peratun* Vol. 4, No. 2, 2 Agustus 2021, *“Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, *Forum Keadilan Nomor 22 tahun II, 17 Februari 1994*, hlm. 77
- Rizky Kurniasih, Noor Rohman, & Hitapriya Suprayitno, *“Kajian Awal Pengelolaan Aset Tetap pada Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali”*, *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm. 29
- Soerojo Wignjodipoero, *“Pengantar dan asas-asas hukum adat”*, (Jakarta: Gunung Alam, 1983), hlm. 27-31
- Urip Santoso, *“Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah”*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, hlm. 187
- Wiwin Yuliangi, *“Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling”*, *Quanta*, Vol. 2, No. 2, Mei 2018, hlm. 84
- Yani Apriani, *“Permasalahan dan Upaya dalam Pengelolaan Aset Tanah BUMN (Studi Kasus PT. PLN (Persero)”*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, Januari 2023, hlm. 227

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik  
Negara/Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

## **INTERNET**

Rizkan Zulyadi, “*Sumber Hukum Dalam Tata Hukum Indonesia*”,  
<http://rizkan.blog.uma.ac.id/2018/11/30/sumber-hukum-dalam-tata-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 Juli pukul 21.52 WIB

Judika, Subbag Hukum BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, 2015, hlm. 2

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>, diakses pada tanggal 8 November  
2023 pukul 14.32

Alfa Sierra, dalam <https://www.asdf.id/aset-bergerak-dan-tidak-bergerak/>, diakses  
pada 16 Oktober 2023 pukul 10.41

Ichsan Emerald Alamsyah,  
<https://news.republika.co.id/berita/rp6xyf349/pengadilan-negeri-lubuk-pakam-tunda-eksekusi-hgu-62-penara-kebun-ptpn-2>, Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam tunda Eksekusi HGU 62 Penara Kebun PTPN 2, diakses pada  
tanggal 23 Oktober pukul 11.15

Bachtiar Rojab, <https://www.inews.id/news/nasional/mahfud-md-ungkap-dugaan-mafia-tanah-di-deli-serdang-bisa-rugikan-negara-rp17-triliun>, Mahfud MD Ungkap Dugaan Mafia Tanah di Deli Serdang bisa rugikan negara Rp1,7 Triliun, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 11.16

Kurniawan Eka Muyana, [https://www.kompas.tv/nasional/426788/bedah-kasus-sengketa-lahan-ptpn-ii-di-tanjung-morawa-mahfud-md-sebut-temukan-keanehan?page=all&lg\\_method=google](https://www.kompas.tv/nasional/426788/bedah-kasus-sengketa-lahan-ptpn-ii-di-tanjung-morawa-mahfud-md-sebut-temukan-keanehan?page=all&lg_method=google), Bedah Kasus Sengketa Lahan PTPN II di Tanjung Morawa, Mahfud MD sebut temukan keanehan, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 11.17

<https://www.ptpn4.co.id/berkat-pendekatan-persuasif-eksekusi-lahan-ptpn-iv-kebun-balimbingan-berlangsung-kondusif/#:~:text=Simalungun%20%E2%80%93%20Tim%20Juru%20Situa%20Pengadilan,19%2F12%2F2022>), Berkat Pendekatan Persuasif, Eksekusi Lahan PTPN IV Kebun Balimbingan Berlangsung Kondusif, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.53